

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDIKMISI TERHADAP
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN SIBOLGA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area - Medan

Oleh:

**Risma Mariva Tua Lumban Gaol
NPM. 161801041**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/3/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

N a m a : Risma Mariva Tua Lumban Gaol
N I M : 161801041
Program : Magister Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. W a r j i o, MA

Drs. Usman Tarigan, MS

Direktur,

Ketua Program Studi ,

Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Dr. W a r j i o, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 Mei 2018

(Risma Mariva Tua Lomban Gaol)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

N a m a : Risma Mariva Tua Lumban Gaol
N I M : 161801041
Program : Magister Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. W a r j i o, MA

Drs. Usman Tarigan, MS

Direktur,

Ketua Program Studi ,

Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Dr. W a r j i o, MA

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Nama : Risma Mariva Tua Lumban Gaol; NPM. 161801041

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) mulai tahun 2010 meluncurkan Program Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini disusun untuk memberikan kesempatan dan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan kemampuan akademik yang memadai untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan informan diambil dari pengelola dan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Beasiswa Bidikmisi merupakan program yang memiliki tujuan besar yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Memutus mata rantai kemiskinan ini memiliki arti bahwa beasiswa Bidikmisi mampu memberikan kesempatan kepada seluruh siswa di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sudah berupaya mencapai tujuan program utama dengan memberikan kesempatan untuk seluruh mahasiswa miskin berprestasi untuk mengenyam pendidikan tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hal yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sosialisasi penerimaan mahasiswa beasiswa Bidik Misi tahun 2015-2017, rekrutmen penerima beasiswa Bidik Misi, hasil rekrutmen yang tidak transparan, dan pelayanan serta prosedur Bidik Misi yang bertentangan dengan aturan di Pusat.

Keywords: Implementasi kebijakan, Program Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

ABSTRACT

Implementation of Bidikmisi Policy on Improving the Quality of Education Implementation at Sibolga Fishery High School

Name: Risma Mariva Tua Lumban Gaol; NPM. 161801041

Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture (now Ministry of Research, Technology and Higher Education) began in 2010 launched the Outstanding Poor Education Scholarship (Bidikmisi) Scholarship Program. Bidikmisi is an educational cost aid for prospective students who are economically incapable and have good academic potential to pursue higher education in college on superior courses to graduate on time. The program is structured to provide opportunities and expectations for economically disadvantaged people with sufficient academic ability to obtain a proper education so that ultimately it can improve the welfare of their lives.

This study aims to determine and analyze the implementation of Bidikmisi Policy on Quality Improvement of Education Implementation at Sibolga Fishery High School. The method used is descriptive quantitative, with informants taken from the manager and student of Bidikmisi scholarship recipient. Data analysis with qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that Bidikmisi Scholarship Policy is a program that has a big goal of breaking the poverty chain. Breaking down this poverty chain means that Bidikmisi scholarships are able to provide opportunities for all students in Indonesia to continue their education at university level which in turn can improve their lives and reduce poverty in Indonesia. Implementation of Bidikmisi scholarship policy at Sibolga Fishery High School has attempted to achieve the main program objectives by providing opportunities for all poor students to achieve higher education. However, in the implementation still found a variety of things that still need to be considered and improved. the factors that influence the socialization of student acceptance of Bidik Misi scholarship in 2015-2017, recipients of Bidik Misi scholarship recipients, the results of non-transparent recruitment, and services and procedures Bidik Misi is against the rules at the Center.

***Keywords:** Policy Implementation, Education Scholarship Program for Poor Achievers (Bidikmisi), Sibolga Fishery High School.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
22.1. Kebijakan Publik	7
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	10
2.3. Model Kebijakan Publik.....	13
2.4. Program Bidik Misi	18
2.5. Kajian Variabel Penelitian.....	25
2.6. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempa Penelitian	33
3.2. Metode Penelitian.....	33
3.3. Informan Penelitian	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	34
3.5. Definisi Konsep.....	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Sibolga	37
4.1.1. Gambaran Umum Kota Sibolga.....	49
4.1.2. Profil Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga	52
4.2. Implementasi Program Bidikmisi di STP Sibolga	54
4.2.1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan	54
4.2.2. Sumber Daya	64
4.2.3. Komunikasi	67
4.2.4. Karakteristik Agen Pelaksana	68
4.2.5. Disposisi Implementator	70
4.2.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	71

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran - Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc , Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
5. Pimpinan beserta seluruh staf, Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga atas informasi yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

7. Terimakasih pula kepada suami dan anak-anaku tercinta serta semua fihak yang telah meberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 15 Mei 2018

P e n u l i s

(Risma Mariva Tua Lomban Gaol)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 Mei 2018

(Risma Mariva Tua Lomban Gaol)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

N a m a : Risma Mariva Tua Lumban Gaol
N I M : 161801041
Program : Magister Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. W a r j i o, MA

Drs. Usman Tarigan, MS

Direktur,

Ketua Program Studi ,

Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Dr. W a r j i o, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 Mei 2018

(Risma Mariva Tua Lomban Gaol)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

N a m a : Risma Mariva Tua Lumban Gaol
N I M : 161801041
Program : Magister Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. W a r j i o, MA

Drs. Usman Tarigan, MS

Direktur,

Ketua Program Studi ,

Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Dr. W a r j i o, MA

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Nama : Risma Mariva Tua Lumban Gaol; NPM. 161801041

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) mulai tahun 2010 meluncurkan Program Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini disusun untuk memberikan kesempatan dan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan kemampuan akademik yang memadai untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan informan diambil dari pengelola dan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Beasiswa Bidikmisi merupakan program yang memiliki tujuan besar yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Memutus mata rantai kemiskinan ini memiliki arti bahwa beasiswa Bidikmisi mampu memberikan kesempatan kepada seluruh siswa di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sudah berupaya mencapai tujuan program utama dengan memberikan kesempatan untuk seluruh mahasiswa miskin berprestasi untuk mengenyam pendidikan tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hal yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sosialisasi penerimaan mahasiswa beasiswa Bidik Misi tahun 2015-2017, rekrutmen penerima beasiswa Bidik Misi, hasil rekrutmen yang tidak transparan, dan pelayanan serta prosedur Bidik Misi yang bertentangan dengan aturan di Pusat.

Keywords: Implementasi kebijakan, Program Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

ABSTRACT

Implementation of Bidikmisi Policy on Improving the Quality of Education Implementation at Sibolga Fishery High School

Name: Risma Mariva Tua Lumban Gaol; NPM. 161801041

Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture (now Ministry of Research, Technology and Higher Education) began in 2010 launched the Outstanding Poor Education Scholarship (Bidikmisi) Scholarship Program. Bidikmisi is an educational cost aid for prospective students who are economically incapable and have good academic potential to pursue higher education in college on superior courses to graduate on time. The program is structured to provide opportunities and expectations for economically disadvantaged people with sufficient academic ability to obtain a proper education so that ultimately it can improve the welfare of their lives.

This study aims to determine and analyze the implementation of Bidikmisi Policy on Quality Improvement of Education Implementation at Sibolga Fishery High School. The method used is descriptive quantitative, with informants taken from the manager and student of Bidikmisi scholarship recipient. Data analysis with qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that Bidikmisi Scholarship Policy is a program that has a big goal of breaking the poverty chain. Breaking down this poverty chain means that Bidikmisi scholarships are able to provide opportunities for all students in Indonesia to continue their education at university level which in turn can improve their lives and reduce poverty in Indonesia. Implementation of Bidikmisi scholarship policy at Sibolga Fishery High School has attempted to achieve the main program objectives by providing opportunities for all poor students to achieve higher education. However, in the implementation still found a variety of things that still need to be considered and improved. the factors that influence the socialization of student acceptance of Bidik Misi scholarship in 2015-2017, recipients of Bidik Misi scholarship recipients, the results of non-transparent recruitment, and services and procedures Bidik Misi is against the rules at the Center.

***Keywords:** Policy Implementation, Education Scholarship Program for Poor Achievers (Bidikmisi), Sibolga Fishery High School.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	7
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	10
2.3. Model Kebijakan Publik.....	13
2.4. Program Bidik Misi	18
2.5. Kajian Variabel Penelitian.....	25
2.6. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempa Penelitian	33
3.2. Metode Penelitian.....	33
3.3. Informan Penelitian	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	34
3.5. Definisi Konsep.....	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Sibolga	37
4.1.1. Gambaran Umum Kota Sibolga.....	49
4.1.2. Profil Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga	52
4.2. Implementasi Program Bidikmisi di STP Sibolga	54
4.2.1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan	54
4.2.2. Sumber Daya	64
4.2.3. Komunikasi	67
4.2.4. Karakteristik Agen Pelaksana	68
4.2.5. Disposisi Implementator	70
4.2.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	71

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran - Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc , Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
5. Pimpinan beserta seluruh staf, Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga atas informasi yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

7. Terimakasih pula kepada suami dan anak-anaku tercinta serta semua fihak yang telah meberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 15 Mei 2018

Penulis

(Risma Mariva Tua Lomban Gaol)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 Mei 2018

(Risma Mariva Tua Lomban Gaol)

Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Oleh :

Risma Mariva Tua Lumban Gaol

Magister Administrasi Publik, UMA, Medan (061) 82011994

ABSTRACT

The Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture (now the Ministry of Research, Technology and Higher Education) began in 2010 to launch the Education Scholarship Program for Poor Students with Achievement (Bidikmisi). Bidikmisi is an education cost assistance for prospective students who are not economically capable and have good academic potential to study at tertiary institutions in excellent study programs until graduating on time. This program is designed to provide opportunities and expectations for people who are economically disadvantaged with adequate academic ability to obtain a decent education so that it can ultimately improve their welfare. The results of this study indicate that the implementation of the Bidikmisi scholarship policy at Sibolga Fisheries College has attempted to achieve the main program objectives by providing opportunities for all poor students to achieve higher education. However, in its implementation there are still various things that still need attention and improvement. influencing factors are the socialization of the acceptance of Bidik Misi scholarship students in 2015-2017, recruitment of recipients of Bidik Misi scholarships, non-transparent recruitment results, and services and procedures for Bidik Misi that are contrary to the rules at the Center.

Keywords: Policy implementation, Education Scholarship Program for Poor Students with Achievement (Bidikmisi), Sibolga Fisheries College.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama bangsa Indonesia saat ini. Kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan salah satunya melalui bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat pokok dan penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah baik dalam sistem maupun pembiayaan. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31(1)

Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena

itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi, bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) mulai tahun 2010 meluncurkan Program Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi). Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini disusun untuk memberikan kesempatan dan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan kemampuan akademik yang memadai untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pada awal kemunculannya tahun 2010, besaran beasiswa Bidikmisi yaitu Rp 5.000.000,00 per

semester dengan fokus utama pada biaya hidup. Pada tahun berikutnya fasilitas yang diberikan berkembang. Program Bidikmisi memberikan fasilitas beasiswa berupa bantuan biaya hidup yang diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah Rp.6.000.000,00 per semester dengan rincian Rp.600.000,00 per bulan untuk biaya hidup dan Rp 400.000,00 per bulan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan. Besaran biaya tersebut sama di setiap tahun penyelenggaraan beasiswa. Selain biaya diatas, mahasiswa Bidikmisi juga dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Pelatihan yang diberikan diantaranya pelatihan kewirausahaan, ESQ, pelatihan pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan pelatihan kemampuan bahasa Inggris.

Penyelenggara program beasiswa Bidikmisi di regional Sumatera Utara diantaranya adalah Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Sibolga. Terhitung sejak tahun 2015, Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Sibolga merupakan bagian dari penyelenggara program Bidikmisi. Sejak tahun 2015 penerima beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Sibolga sebanyak 12 orang mahasiswa.

Alokasi besaran biaya yang berikan pemerintah kepada penerima beasiswa Bidikmisi yaitu Rp1.000.000,00 per bulan dengan rincian maksimal 40% untuk biaya pendidikan dan 60% untuk biaya hidup mahasiswa. Penentuan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi ditentukan oleh :

- Tingkat perekonomian rata-rata

mahasiswa perguruan tinggi b. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa Bidikmisi c. Laporan penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi tahun sebelumnya. Faktor-faktor inilah yang mendorong peneliti untuk mengathui pelaksanaan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Sibolga.

Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Bidikmisi sudah menjelaskan secara detail aturan penyelenggaraan kebijakan. Program beasiswa Bidikmisi mempunyai tujuan besar yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan harus turut berupaya mengatasi masalah kemiskinan ini salah satunya dengan menyelenggarakan kebijakan beasiswa Bidikmisi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah upaya bersama dengan melibatkan pelaksana, masyarakat dan khususnya mahasiswa penerima beasiswa. Penelitian ini dilakukan dalam rentan waktu 2015 hingga 2017 dimana merupakan awal dilaksanakan program beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Sibolga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap

Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga ?

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Kata kebijakan (Policy) itu sendiri, menurut Bernard Schaffer dikutip Ino Sutisna Rawita (2013 : 9), kebijakan mempunyai tiga makna. Pertama, kebijakan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diasosiasikan orang dengan polis. Makna kedua, berkaitan dengan tinjauan informasi dan determinasi tindakan yang sesuai. Makna ketiga, berkaitan dengan pengamanan dan komitmen sumber daya. Sedangkan menurut Amara Raksasa Taya, sebagaimana dikutip Ino Sutisna Rawita (2013:15), mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara Budiardjo dalam Ino Sutisna Rawita (2013:15), mendefinisikan kebijakan sebagai sekumpulan keputusan yang

diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi. Menurut definisi tersebut pihak yang menyusun kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Implementasi Kebijakan

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus Oxford-Advanced Learner's Dictionary (1995:595) bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut : "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut."

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* (Andrew Dunsire dalam Abdul Wahab, 1997:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut (Walter Williams dalam Abdul Wahab, 1997 : 61).

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:109) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan.
- 3) Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana.
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- 6) Kecenderungan pelaksana.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya dirumuskan dengan jelas agar tujuan dapat tercapai dimana kejelasan rumusan standard dan tujuan kebijakan sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakan tersebut. Dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada dapat menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Sumber-sumber kebijakan atau sumber daya diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan secara efektif yang meliputi sumber daya manusia misalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan dan sumber daya dana, sarana maupun prasarana.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menyangkut kejelasan, ketepatan, konsistensi, dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut sehingga akan memudahkan pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian keberhasilan implementasi memerlukan jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut mencakup baik intern maupun ektern, yakni hubungan didalam lingkungan sistem politik dengan kelompok sasaran maupun antar organisasi.

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut lingkungan sosial dan politik (dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan.

Kecenderungan pelaksana (implementor) menyangkut persepsi-persepsi pelaksana untuk mendukung atau menentang kebijakan. Tanpa adanya persepsi yang sama antara pelaksana dan pembuat keputusan akan menghambat bagi kelancaran implementasi kebijakan.

Dari model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk memenuhi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, karakteristik, birokrasi pelaksana diperlukan adanya komunikasi yang tepat. Juga diperlukan adanya sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber dana, sarana maupun prasarana agar kebijakan dapat terimplementasikan. Dan tersedianya sumber daya ekonomi serta lingkungan sosial dan politik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini mengambil model Van Meter dan Van Horn dengan satu variabel yang diambil yakni kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pertimbangan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian yang ada yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini.

Program Bidikmisi

Bidikmisi adalah singkatan dari Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi, dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga

kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik dan konsisten semasa sekolah di SMA (kemahasiswaan.uny.ac.id). Seperti yang juga dijelaskan oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015 bahwa, Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiapwarga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didikpada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara

ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan diperguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara lain dengan menyusun database siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau menyediakan bantuan biaya pendidikan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan

Bidikmisi. 2. Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Bidikmisi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015, menyebutkan misi, tujuan, serta sasaran program bidikmisi untuk mencapai keberhasilan program. Antara lain :

Misi : 1) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; 2) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan : 1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik; 2) Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu; 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler; 4) Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif; 5) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuklain yang sederajat tahun 2014

dan 2015 yang tidak mampu secara ekonomi dan memilikipotensi akademik baik.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang beralamat di Jalan Kakap. No. 57 Kecamatan Sibolga Sambah, Kota Sibolga, Prov. Sumatera, dan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan April 2018. Metode penelitian dilakukan melalui analisis deskriptif, dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Sebagai informan dari penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Berdasarkan kriteria tersebut maka informan diambil secara *purposive*, yaitu mereka yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, yang terdiri dari : Direktur Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, Wakil Direktur bidang kemahasiswaan, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan sumber informasi yang mengerti permasalahan yang diteliti terutama pada bidang yang menangani langsung pelaksanaan Program;
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan – bahan publikasi lainnya.

Data – data yang sudah terkumpul selanjutnya perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas. Dengan format penelitian deskriptif, maka analisis data dilakukan melalui interpretasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris. Interpretasi dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). Pengumpulan data, melalui teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder serta wawancara dan observasi untuk memperoleh data bersifat primer.
- b). Penilaian data dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas dan reabilitas. Untuk itu ditempuh prosedur:
- Mengkategorisasikan data primer dan sekunder dengan system pencatatan yang relevan
 - Melakukan kritik atas data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk melakukan

control apakah data tersebut relevan untuk digunakan.

- c). Interpretasi dan penyajian data, dilakukan dengan membuat analisis data dan fakta melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris. Untuk itu diperlukan kecermatan dan harus dibekali dengan seperangkat teori yang relevan. Agar penyajian data lebih informative dan jelas, maka hasil interpretasi dan analisis data disajikan dalam bentuk table, persentase serta membuat deskripsi dalam rangkaian yang logis.
- d). Penyimpulan, yaitu penarikan kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Dalam menganalisis kebijakan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:109) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan.

- 3) Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana.
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.
- 6) Kecenderungan pelaksana.

1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan Indikatorya: a. Ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada dengan kenyataan. b. Indikator keberhasilan program Bidikmisi (input, proses dan output) di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi dilaksanakan dengan standar dan sasaran yang sama yaitu dengan berpedoman pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dasar Hukum pelaksanaan beasiswa Bidikmisi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dikti. Standar dan sasaran program implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sudah mendukung pelaksanaan kebijakan. Standar pelaksanaan dapat diwujudkan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan, namun dalam pedoman detail mengenai kegiatan seleksi calon penerima beasiswa perlu diatur lebih jelas sehingga tidak terjadi berbagai versi seleksi yang akan berdampak

pada aspek Tepat Sasaran dalam prinsip pelaksanaan beasiswa Bidikmisi. Proses seleksi calon penerima beasiswa Bidikmisi dilakukan oleh Kesma Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga bekerjasama dengan mahasiswa melalui BEM dan Kamadiksi. Segala bentuk ketentuan survey, mekanisme, pembagian dana dan pembagian wilayah survei diatur oleh mahasiswa sebagai pelaksana dengan persetujuan Kesma. Dalam hal ini peran tersentral pada mahasiswa. Proses seleksi dilakukan oleh mahasiswa Bidikmisi yang lebih senior (angkatan sebelumnya) dengan mekanisme yang ditentukan oleh Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Peran tersentral pada pengelola beasiswa Bidikmisi dengan melibatkan mahasiswa sebagai surveyor. Ketentuan, mekanisme, dana dan pembagian wilayah survei diatur oleh Tim Pengelola Bidikmisi.

Tujuan kebijakan program beasiswa Bidik Misi berdasarkan panduan program beasiswa Bidik Misi ada 6 yaitu:

- a) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
- b) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
- c) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu. - Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada

bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.

- d) Menimbulkan dampak bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif.
- e) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, yaitu: *“Tujuan dari dibentuknya kebijakan ini adalah yang pertama, untuk mencari mahasiswa dengan potensi akademik yang baik serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, membantu setiap mahasiswa yang penghasilan orangtua mahasiswa dibawah tiga juta rupiah. Nah, dari keenam pada buku panduan Bidik Misi sudah cukup jelas bagaimana tujuan dari program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Beasiswa Bidik Misi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sudah mencapai hasil yang maksimal dimana setiap penerima beasiswa Bidik Misi memenuhi target studi yang harus dituntaskan hingga tujuan program Bidik Misi ini dapat tercapai.”* (Wawancara Tanggal 13 Maret 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, menunjukkan bahwa tujuan program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sama dengan apa yang sudah

ditetapkan pada buku panduan beasiswa Bidik Misi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua pengurus beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, dengan Bapak Taufik: *“Beasiswa Bidik Misi memiliki tujuan sebanyak enam, sesuai dengan buku panduan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa seluruh bantuan Bidik Misi harus menjangkau mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berprestasi secara akademik. Banyak mahasiswa penerima Bidik Misi yang sangat terbantu dengan adanya program ini. Ini merupakan bukti nyata bahwa beasiswa Bidik Misi sangat berperan dalam membantu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mencapai tujuan Bidik Misi termasuk di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.”* (Wawancara Tanggal 13 Maret 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka tujuan beasiswa Bidik Misi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sesuai dengan buku panduan yang ditetapkan oleh pusat. Namun, berbeda dengan pendapat pengurus Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi (FORMADIKSI), dengan saudara Raffli yang menyatakan bahwa: *“Tujuan program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga belum sepenuhnya menjangkau para mahasiswa-mahasiswi yang tidak mampu secara ekonomis namun berpotensi akademik yang baik. Inilah yang*

menjadi dilema yang harus segera dicek kembali untuk mencapai hasil tujuan yang maksimal sesuai dengan tujuan program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.” (Wawancara Tanggal 13 Maret 2018).

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diatas, mengenai tujuan dari kebijakan ini ada yang mengatakan berhasil dan ada juga pihak yang menyatakan tujuan dari kebijakan ini belum tercapai. Program Bidik Misi harus mencapai target sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tidak terlepas dari kendali para pengurus tim Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

Sasaran Kebijakan Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MK, atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan Tahun Angkatan Kelulusan, yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik. Berikut ini kutipan wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan terkait dengan sasaran kebijakan program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga: “Sasaran kebijakan program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga meliputi bagi calon penerima yang sudah sah diterima lulus masuk Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga serta lulus wawancara atau pemberkasan program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Semua calon penerima program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga berhak untuk mengajukan berkasnya untuk

mengikuti jenjang pendidikan dengan bebas memilih jurusannya sendiri. Jadi, sasaran kebijakan program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sesuai dengan apa yang tertera dengan buku panduan Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.” (Wawancara Tanggal 13 Maret 2018).

Efisiensi Yaitu jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam penerapan kebijakan.

Jika dilihat dari jumlah ketiga sub indikator diatas, yaitu biaya, waktu dan tenaga yang telah maksimal diberikan dalam penerapan kebijakan, tetapi tingkat efektivitasnya kebijakan program beasiswa Bidik Misi masih rendah, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak efisien. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber, yaitu: “Jika dilihat dari biaya yang telah dihabiskan pada masa sosialisasi sangat besar mulai dari membuat pengumuman, membuat informasi, serta kegiatan program Bidik Misi lainnya untuk semua Angkatan dan setiap jurusan yang berbeda-beda di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga masih dibawah harapan yang seharusnya sesuai dengan tujuan program beasiswa Bidik Misi secara

Nasional.” (Wawancara Tanggal 13 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang penerima beasiswa Bidikmisi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, yaitu Saudara Maulidatul Khoiriyah Harahap : “Menurut saya ini belumlah efisien, sebab ini masih bisa dimaksimalkan lagi dalam hal pelaksanaannya sehingga nantinya hasil atau tujuan yang diharapkan dari semua program beasiswa Bidik Misi akan lebih baik kedepannya.” (Wawancara Tanggal 15Maret 2018).

Dari observasi dan hasil wawancara peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan mengenai program beasiswa Bidik Misi belum efisien, mengingat besarnya usaha yang diberikan, waktu yang telah dihabiskan serta jumlah tenaga yang dipakai, namun dalam penerapannya tetap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat hingga saat ini di sejumlah Fakultas dan Angkatan penerima beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga masih ada program yang tidak dijalankan sama sekali.

2) Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dari sisi kualitas SDM Bagian Kesejahteraan Mahasiswa selaku pengelola sudah mencukupi. Dari segi pendidikan, dari 4 staff Bagian Kesejahteraan Mahasiswa, 1 staff adalah lulusan

S2, 1 staff lulusan S1, dan 1 staff lulusan D3. Sumber daya dalam implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dibentuk dari berbagai elemen di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sehingga memperkaya kualitas SDM dalam pelaksanaan beasiswa Bidikmisi. Tim Pengelola Bidikmisi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga terdiri dari berbagai elemen yaitu dosen, karyawan, serta mahasiswa dalam *Bidikmisi Scholarship Community* (BSC).

Sperti dijelaskan oleh Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, yang menyatakan bahwa:“Jika dilihat dari sumberdaya penyelenggara beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, secara umum sudah memadai karena jumlah mahasiswa peserta bidikmisi belum begitu banyak, sejak tahun 2015 sampai 2017, jumlahnya hanya 12 orang saja, sehingga pelayanan terhadap mereka masih bisa dilayani dengan jumlah staf yang ada sekarang ini.” (Wawancara Tanggal 13 Maret 2018).

Anggaran dana beasiswa Bidikmisi dikelola dengan baik oleh Dikti. Perguruan tinggi selaku pelaksana kebijakan tidak ikut serta dalam pengelolaan dana. Perguruan tinggi hanya mengelola mekanisme pencairan dana dan pengelolaan dana pendidikan yang disalurkan oleh Dikti melalui rekening perguruan tinggi. Alokasi anggaran dari pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun mengalami tren peningkatan di seluruh Indonesia.

Hal ini merupakan upaya pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas beasiswa Bidikmisi di seluruh perguruan tinggi.

Seberapa jauh suatu kebijakan mengenai program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga Tahun 2015-2017 tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dimana didalam suatu kebijakan, terdapat alternatif apa yang akan dilakukan jika kebijakan telah diterapkan. Indikator penilaiannya adalah:

a) Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, kinerja pelaksana kebijakan mengenai program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga ini masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurang berperannya pelaksana teknis dalam melakukan suatu kegiatan yang menyangkut masalah program beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga Tahun 2015-2017. Selain itu, antara rencana yang telah ditetapkan tidak sejalan dengan pelaksanaannya dilapangan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber, dari mahasiswa penerima Bidik Misi Tahun 2016: "Kinerja dalam menjalankan program beasiswa Bidik Misi masih kurang, ini saya mengatakan demikian, karena dalam setiap apa yang sudah ditetapkan setiap program yang harus dijalankan oleh Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, ada yang tidak dilaksanakan.

Banyak mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa Bidik Misi Universitas tidak tau akan hal itu. Seharusnya program yang rutin dilaksanakan oleh kampus, harus benarbenar diterapkan dengan dana yang sudah diberikan oleh DIKTI serta didukung program pengembangan bakat mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa Bidik Misi mulai dari Angkatan 2015 sampai selanjutnya. (Wawancara Tanggal 23 Maret 2018).

Selain itu, dalam pendanaan sering sekali terlambat bahkan ada sampai satu tahun baru diberikan. Seperti uang buku untuk Angkatan 2010,2011 dan 2012 yang sudah ditandatangani amprah pembayaran, akan tetapi pencairan dana kerekening sampai satu tahun baru dapat digunakan oleh penerima beasiswa Bidik Misi. Inilah yang menjadi salah satu masalah yang terdapat pada program beasiswa Bidik Misi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga."

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu penerima beasiswa Bidik Misi angkatan 2017 mengatakan bahwa : "Setiap kegiatan yang sudah ditetapkan oleh kampus, dimana kegiatan ini merupakan program beasiswa penerima Bidik Misi se-Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Saya menilai bahwa setiap program yang dilaksanakan masih ada yang kurang jelas. Dimana setiap Angkatan penerima beasiswa Bidik Misi selalu merasa kebingungan bagaimana kegiatan yang seharusnya rutin dilaksanakan secara terperinci, akan tetapi ada kegiatan atau

program beasiswa Bidik Misi tidak dilaksanakan sama sekali. Seperti kegiatan study tour yang hanya dilaksanakan sekali dalam penerimaan bantuan beasiswa Bidik Misi. Kegiatan ini hanya dilakukan untuk Angkatan 2015. Angkatan 2017 tidak dilaksanakan sama sekali. Ini yang membuat setiap mahasiswa bingung, mengapa dalam setiap tahun mengalami perbedaan program kegiatan, apakah ada kendala segi dana atau kendala yang lain? Saya sebagai mahasiswa sering juga bertanya kepada pengurus Forum Mahasiswa Beasiswa Bidik Misi (FORMADIKSI) Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga tentang hal yang demikian. Bahwa setiap program yang sudah ditetapkan oleh pusat dan diberikan kewenangan kepada Kampus untuk mengelola dengan berbagai kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa penerima Bidik Misi, harus dilaksanakan!” (Wawancara Tanggal 23 Maret 2018).

Dengan pernyataan Ketua Pengelola Beasiswa Bidik Misi, : “Kegiatan program beasiswa Bidik Misi memang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DIKTI. Namun, terkadang ada kewenangan kampus dalam mengatur apakah kegiatan ini wajib atau tidak diwajibkan. Seperti kegiatan study tour yang memang harus dilaksanakan setiap Angkatan penerima beasiswa Bidik Misi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Angkatan yang terakhir dalam penerima beasiswa Bidik Misi yaitu Angkatan 2015, sementara untuk Angkatan 2016 memang tidak diadakan sama sekali, hal ini

dikarenakan adanya benturan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan program beasiswa Bidik Misi. Inilah yang membuat masalah dalam pengelolaan kegiatan program beasiswa Bidik Misi selama masa berlaku untuk setiap Angkatan penerima beasiswa Bidik Misi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

3) Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi selama 4 tahun, sudah terjalin komunikasi yang baik dari semua pihak. Kesma Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sebagai pelaksana teknis sudah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kemahasiswaan tingkat fakultas dan mahasiswa. Komunikasi tersebut terjalin agar tercipta suatu komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat agar tercipta pelaksanaan kebijakan yang tidak tumpang tindih. Namun, hambatan dalam komunikasi ini masih ditemukan khususnya yaitu komunikasi terhadap kelompok sasaran. Hambatan ini berkaitan dengan pola komunikasi antara pengelola dengan paguyuban mahasiswa Bidikmisi (Kamadiksi), BEM, dan koordinator fakultas mahasiswa Bidikmisi yang dibentuk pada awal penerimaan beasiswa Bidikmisi. Kelompok mahasiswa tersebut memiliki peran yang tidak teratur dan secara individualis menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan informasi. Hal ini yang sering menyebabkan informasi ganda bagi mahasiswa Bidikmisi.

Komunikasi antar pengelola dilaksanakan dengan baik. Komunikasi antar organisasi antara Tim Pengelola dan Kesma Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga terjalin sangat baik. Sebagai personil tim pengelola adalah staff kesma Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Komunikasi dengan kelompok sasaran terjalin sangat baik melalui BSC. BSC terbentuk sebagai jembatan penghubung antara pengelola dengan kelompok sasaran. Sistem yang terbentuk dalam BSC telah terstruktur dan terpusat sebagai wadah komunikasi mahasiswa Bidikmisi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga tanpa terkecuali.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur pelaksana beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga selama kurun waktu 4 tahun tidak terjadi banyak perubahan. Pelaksana beasiswa Bidikmisi masih tetap Bagian Kesejahteraan Mahasiswa di bawah Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Pergantian personil pelaksana dalam Bidang Kesejahteraan Mahasiswa mengikuti rotasi pejabat yang terjadi di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Struktur pelaksanaannya tidak banyak berubah. Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Secara struktural Tim Pengelola Bidikmisi tetap sama setiap tahunnya. Standart Operational Procedure (SOP) pelaksanaan beasiswa Bidikmisi dalam kurun waktu empat tahun masih sama. SOP ini tertuang dalam

Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pengawasan yang dilakukan oleh DIKTI dari setiap kegiatan program beasiswa Bidik Misi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga mulai Tahun 2015-2017 bahwa ada kegiatan yang tidak dilakukan sama sekali. Juga dari pihak mahasiswa yang membentuk lembaga Forum Mahasiswa Bidik Misi (FORMADIKSI) Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga juga mengawasi setiap kegiatan program beasiswa Bidik Misi. Hal ini didukung dengan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi Angkatan 2015 dengan saudari Devi Yanti Chaniago: "Setiap kegiatan program beasiswa Bidik Misi selalu diawasi oleh organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa penerima Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, mulai Angkatan 2015 hingga sekarang masih tetap dilakukan pengawasan secara preventif guna mencegah penyelewengan dana beasiswa. Ini dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga untuk mendukung adanya transparansi anggaran dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola tingkat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga hingga lembaga mahasiswa yang ikut membantu berjalannya kegiatan program beasiswa Bidik Misi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga." (Wawancara Tanggal 23 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Pengelola beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga: “Pengawasan yang pernah dilakukan oleh tim audit keuangan yang pernah memeriksa keuangan beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, bahwa setiap dana kegiatan baik pengembangan bakat dan ekstrakurikuler itu diperiksa secara rinci, dan hasil dari tim audit menyimpulkan bahwa adanya sisa dana pada Tahun 2016 yaitu sebanyak dua juta, dimana dana ini merupakan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan seminar motivasi. Akan tetapi, tidak dilaksanakan karena program ini bersifat tidak menetap berbeda dengan kegiatan study tour yang seharusnya rutin dilaksanakan oleh pihak pengelola beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.” (Wawancara Tanggal 23 Maret 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa adanya bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh tim audit untuk memeriksa keuangan atau dana beasiswa Bidik Misi. Adanya dana sisa yang tidak digunakan oleh pengelola untuk melaksanakan kegiatan atau program beasiswa Bidik Misi sebagaimana mestinya. Program atau kegiatan beasiswa Bidik Misi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga wajib diikuti oleh sejumlah penerima bantuan beasiswa setiap semesternya hingga habis masa kontrak selama delapan semester.

5) Disposisi Implementator

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang telah direncanakan dan sebaliknya. Disposisi implementor mencakup tiga hal, yakni:

- a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
- b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan
- c) intensitas disposisi implementor, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Komitmen pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan beasiswa Bidikmisi, Kesejahteraan Mahasiswa sangat mendukung pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh Dikti. Sikap yang ditunjukkan pelaksana kebijakan sudah sangat baik terhadap sasaran kebijakan. Sikap terbuka ditunjukkan dengan membuka pelayanan mahasiswa. Disposisi atau sikap pelaksana sudah mendukung dalam implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Hal ini terlihat dari selesainya pelaksanaan yang sesuai dengan Pedoman yang sudah

ditetapkan. Sikap terbuka ditunjukkan dengan membentuk website BSC sebagai media yang mewadahi seluruh mahasiswa Bidikmisi

6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Syarat ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Peran masyarakat dalam pelaksanaan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga kurang mendukung. Peran ini sangat terlihat dari proses seleksi mahasiswa Bidikmisi.

Menurut beberapa surveyor beasiswa Bidikmisi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga menyatakan banyaknya masyarakat yang menutup-nutupi keadaan ekonomi mahasiswa calon penerima Bidikmisi yang sebenarnya. Sebagian melakukan pemalsuan data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan memberikan keterangan palsu terkait kondisi ekonomi calon penerima. Kondisi ekonomi dan politik perguruan tinggi dalam kaitannya pelaksanaan beasiswa Bidikmisi tidak memiliki pengaruh.

Bidikmisi merupakan kebijakan nasional yang menunjuk perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan. Pengaruh kondisi ekonomi dan politik nasional lebih berpengaruh dalam kebijakan ini. Pergantian rezim pemerintah pusat dan kondisi ekonomi nasional mempengaruhi ketetapan dan ketentuan kebijakan beasiswa Bidikmisi. Sebagai contoh pada tahun 2014, terjadi pergantian pemerintahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diganti menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pergantian ini mempengaruhi kebijakan yang diambil khususnya Bidikmisi. Tahun 2016, kuota beasiswa Bidikmisi di setiap perguruan tinggi mengalami penurunan dratis. Hal tersebut tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tahun 2016 bahwa kuota beasiswa Bidikmisi adalah 20% dari jumlah penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya. Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga untuk tahun 2016 memiliki kuota 5 orang, dan pada tahun 2017 mendapatkan kuota sebanyak 4 orang..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Kebijakan Beasiswa Bidikmisi merupakan program yang memiliki tujuan besar yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Memutus mata rantai kemiskinan ini memiliki arti bahwa beasiswa Bidikmisi mampu memberikan kesempatan kepada seluruh siswa di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan

tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sudah berupaya mencapai tujuan program utama dengan memberikan kesempatan untuk seluruh mahasiswa miskin berprestasi untuk mengenyam pendidikan tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hal yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

- 2) Secara umum implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi selama kurun waktu 4 tahun di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerima beasiswa Bidikmisi setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi di dua perguruan tinggi ini menunjukkan pengelolaan beasiswa Bidikmisi yang baik sesuai dengan kriteria dari Dikti. Pertama, tingkat perekonomian rata-rata mahasiswa perguruan tinggi, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa Bidikmisi, dan laporan penyelenggaraan beasiswa Bidikmisi tahun sebelumnya. Pelaksanaan Beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga secara sistem masih kurang terorganisir dengan baik. Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi yang masih menjadi satu dengan Bagian Kesejahteraan Mahasiswa

menjadi penyebab sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan program dan tumpang tindih tupoksi. Selain itu, komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran masih kurang sehingga kurang berkoordinasi dengan baik. Secara sistem Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga memiliki sistem yang lebih tertata. Tim Pengelola Khusus Beasiswa Bidikmisi dibentuk dari berbagai elemen pengajar, karyawan, dan ahli. Komunikasi antar pengelola dan kelompok sasaran juga terjadi secara efektif melalui *Bidikmisi Scholarship Community* (BSC).

- 3) Berdasarkan hasil dan pembahasan, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sosialisasi penerimaan mahasiswa beasiswa Bidik Misi tahun 2015-2017, rekrutmen penerima beasiswa Bidik Misi, hasil rekrutmen yang tidak transparan, dan pelayanan serta prosedur Bidik Misi yang bertentangan dengan aturan di Pusat.

Saran-saran

Untuk lebih meningkatkan untuk meningkatkan efektivitas program beasiswa Bidikmisi di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, upaya yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Pada proses seleksi penerima beasiswa, penilaian tentang motivasi untuk kuliah dan kondisi sosio kultural keluarga perlu menjadi pertimbangan utama karena motivasi yang tinggi pada calon penerima beasiswa akan menjadi

pendorong untuk mencapai prestasi tinggi.

- 2) Pemerintah perlu memberi perhatian pada kemudahan persyaratan, ketercukupan beasiswa, keterampilan beasiswa dalam rangka meningkatkan kondisi fisiologis dan psikologis yang menunjang mahasiswa penerima beasiswa dalam mencapai prestasi akademik.
- 3) Pemerintah perlu meningkatkan pelibatan mahasiswa penerima beasiswa dalam perencanaan pembinaan. Hal itu penting dilakukan agar pembinaan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penerima beasiswa.
- 4) Apabila skema pemberian beasiswa tidak memberikan bantuan secara penuh, maka program beasiswa bisa memilih jenis pemberian bantuan non tunai, seperti asrama yang dekat dengan kampus dan dilakukan pendampingan terhadap penerima beasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agung Baskoro SB, 2016. *Efektivitas Program Bidikmisi Di Universitas Negeri Yogyakarta*.
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/5174/4841>.
- Bryan & White, 1987, *Manajemen Pembangunan Untuk Pembangunan Negara Berkembang*, alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta, LP3ES
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, "British Journal of Humaniora and Social Science"
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, William N., 2013, *Analisis Kebijakan Publik*, terjemah *Public Policy Analysis; an Introduction*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama
- Hadari Nawawi, 2011, *Metode Pelatihan bidang Sosial*, Yogyakarta, GMU Press.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.

- Eva Nur Laely. (2015). *Persepsi Mahasiswa Bidikmisi Terhadap Harapan Masa Depannya*. Skripsi. Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro.(2014).
- Eldrian, Rizkie Permata, 2017. *Dinamika Dalam Manajemen Beasiswa Bidikmisi (Studi Komparasi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji)*. <http://repository.umrah.ac.id/317/1/JURNAL%20RIZKIE%20PERMATA%20ELDRIAN.pdf>
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Handyaningrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6*, 1975, London: Sage.
- Muhammad Rusli dan Hamsinah, Maret 2014, *Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative basis, for Poverty Alleviation in Parepare, South Sulawesi*, "International Journal of Sains and Research".
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Kustriani, Sri Hadiati Wara, (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Jakarta : Deputi Bidang Kajian Kebijakan
- Miles, Metthew B. and Michael A. Hubrman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress).
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta; Graha Indonesia.
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*

- Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate- Metode Penelitian Kebijakan Publik**, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Poerwandani, 2007, **Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi**, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia-Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.
- Putra, 2013, **Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik**, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Remi dan Tjiptoherijanto, 2013, **Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**. Jakarta; Elex media Computindo.
- Pardede, Risno H. 2015. Evaluasi Kebijakan Beasiswa Bidik Misi Di Universitas Riau Tahun 2010-2014. **JOM FISIP** Vol. 2 No. 2 – Oktober 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/32658-ID-evaluasi-kebijakan-beasiswa-bidik-misi-di-universitas-riau-tahun-2010-2014.pdf>. Diakses 10 Maret 2018.
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. **Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial**. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono, 1998, **Metodologi Penelitian Administrasi**, Bandung; Alfabeta.
- Suharno, 2008, **Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik**, Yogyakarta; UNY Press.
- Suharno, 2010, **Dasar-dasar Kebijakan Publik**, Yogyakarta; UNY Press.
- Surachmad, Winarno, 1990, **Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik**, Jakarta; Erlangga.
- Sutrisno, 2010, **Organisasi Sektor Publik**, Yogyakarta; Pustaka Utama.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, **Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector**, New York: Plume Book.
- Sugiyono, 2008. **Metode Penelitian Administrasi**, Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, **Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus**. Yogyakarta: YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, **Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta: Sinar Grafika.

Wibawa dkk, 2012, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta; Erlangga.

Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta; Media Press.



Sumber Dokumen :

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan
Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 96
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Bantuan
Biaya Pendidikan
Bidikmisi

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 48
Tahun 2008 Tentang
Pendanaan pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66
Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006
tentang Standar Isi
Permendiknas Nomor.
23/2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan
Satuan Pendidikan.